RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TAHUN 2025

DIbuat oleh:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
Jl. Pamenang No.1-C Katang, Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182,
Email dinkes@kedirikab.go.id, Website dinkes.kedirikab.go.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunannnya, Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 dan juga mempertimbangkan isu-1su yang sedang berkembang saat ini.

Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun berjalan (tahun 2025) melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupatten Kediri.

Kediri, - 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

Ahmad Khotib
NIP. 197003242002121003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) yaitu merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan awal renja juga mengacu kepada renstra yang telah disusun SKPD pada tahun 2021-2026.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan merupakan terjemahan dari visi, misi dan juga program , yang dituangkan di dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana kerja dan Anggaran tahun 2023.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam renja dapat dijalankan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan 2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mengatasi masalah kesehatan nasional, sejalan dengan strategi pemerintahan/ pembangunan

mewujudkan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang berkelanjutan yang penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai dasar untuk rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi serta untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan.
2. meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya.
3. terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5. meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang kesehatan.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Pemerintah Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Pemerintah Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2020 semua SKPD mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, terkait dengan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 Dinas Kesehatan memiliki menjalankan 4 program 22 kegiatan. Pada rancangan awal renja tahun 2025 kali ini Dinas Kesehatan juga mengalami perubahan dalam program dan kegiatan guna menjalankan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam rancangan awal renja ini kami menyajikan hasil evaluasi renja tahun lalu dengan target tahun berikutnya akan disajikan dalam tabel yang berbeda.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra SKPD s/d tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1						**Urusan Kesehatan**								
1	**‘01**					**Bidang Urusan Kesehatan**								
1	**‘01**	**‘01**	1.02	‘01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**78%**	**78%**	**78%**	**100**	**80%**	**158%**	99,5%
			1.02	‘01	201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	**300**	75%
			1.02	‘01	201 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2	100
			1.02	‘01	201	Koordinasi dan	Jumlah laporan	**15 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**100**	**15 laporan**	**45**	100

					.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)							
			1.02	‘01	202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100
			1.02	‘01	202 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	400	100
			1.02	‘01	202 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
			1.02	‘01	202 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
			1.02	**‘01**	**205**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100
			1.02	‘01	205 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	0	20	20	100	180	40	10
			1.02	‘01	205 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	80%	80%	100	80%	240	60
			1.02	**‘01**	**206**	**Administrasi**	**Cakupan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**

						Umum Perangkat Daerah	**pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
			1.02	‘01	206 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	100	2	6	2
			1.02	‘01	206 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	17	17	100	10	51	12,75
			1.02	‘01	206 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	4	100	4	12	3
			1.02	‘01	206 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	80	80	100	90	240	60
			1.02	‘01	206 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	7	100	8	21	5.25
			1.02	‘01	206 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	2	100	3	6	3
			1.02	‘01	206 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	500	500	100	600	1500	375
			1.02	‘01	206 .09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	150	150	100	200	450	112.5
			1.02	**‘01**	**208**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
			1.02	‘01	208 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat	12	12	12	12	100	48	12

							menyurat dalam 1 tahun (kali)							
			1.02	‘01	208 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	‘01	208 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	‘01	208 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	**‘01**	**209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**
			1.02	‘01	209 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	‘01	209 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	10	10	100	400	10
			1.02	‘01	209 .05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	100	2	6	3
			1.02	‘01	209 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Frekuensi pemeliharaan alat	12	12	12	100	12	36	4

						Lainnya	kantor dalam 1 tahun (kali)							
			1.02	‘01	209 .09	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	100	3	9	2.25
			1.02	‘01	209 .10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	100	3	9	2.25
			1.02	**‘01**	**20. 10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
			1.02	‘01	20. 10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesmas	37 puskesmas	37 puskesmas	100	37 puskesmas	37	100
			1.02	**‘02**		**"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"**	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	49%	41.6%	84.89	49%	36	4
							Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,17	0,201	111	0.23		
							Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	85%	95.1%	101	78,5%		
							Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	100%	100%	100	17%		
							AKI	83,8	83,8	138.5	165	79,23		
							AKB	7,1	7,1	7.2	101	6,9		

			1.02	**‘02**	**201**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
			1.02	‘02	201 .02	Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
			1.02	‘02	201 .06	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	100	38,1% (9/35)	50.1	12.52
			1.02	‘02	201 .13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100% (397/397)	300	75
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100% (30/30)	300	75
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100% (25/25)	300	75
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100% (30/30)	300	75
			1.02	‘02	201 .14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75%	77%	77%	100	82%	229	57.25
			1.02	‘02	201 .15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	100 alat	100 alat	100 alat	100	108 alat	300	75

			1.02	‘02	201.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	76%	76%	76%	100	85%	228	57
			1.02	‘02	201.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	7	7	7	100	7	21	5.25
			1.02	‘02	201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 pusk	37 pusk	37 pusk	100	37 pusk	37	100
			1.02	‘02	201.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
			1.02	**‘02**	**202**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	**75%**	**78%**	**78%**	**100**	**85%**	**231**	**57.75**
			1.02	‘02	202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	89%	89%	81.38	91.4%	90%	260	65.75
			1.02	‘02	202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	92%	87.57	95.2%	94%	278	69.5
			1.02	‘02	202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	94%	86.91	92.45	95%	275.91	68.98
			1.02	‘02	202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	77%	77.53	100	80%	234	58.5
			1.02	‘02	202	Pengelolaan	Cakupan Pelayanan	55%	55%	77	140	70%	202	50.5

					.05	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart							
			1.02	‘02	202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	39.87	39.87	100%	239	59.9
			1.02	‘02	202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	50%	53.51	107	55%	158.5	39.6
			1.02	‘02	202.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	100%	100%	25.96	25.96	100%	225	56.25
			1.02	‘02	202.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	100%	100%	92.78	92.78	100%	400	100
			1.02	‘02	202.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	119.07	119.07	100%	319	79.75
			1.02	‘02	202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	25.38	25.38	100%	325	81.25
			1.02	‘02	202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	68.82	68.82	100%	368	92
			1.02	‘02	202.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	‘02	202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	88%	85%	100%	90%	276	69

							Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,35%	14,35%	14,35%	100	15%	44	40
			1.02	‘02	202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	40 Pos	45	105	45 Pos		
			1.02	‘02	202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa ODF	62,30%	62,30%	60	92	70,00%	222	169
			1.02	‘02	202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	6	5	90	6	18	
			1.02	‘02	202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	‘02	202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	‘02	202.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	‘02	202.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

						Laboratorium Rujukan/Nasional	laboratorium pemeriksa							
			1.02	‘02	202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100	20	20	
			1.02	‘02	202.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
			1.02	‘02	202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan lainya	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	3 puskesmas	3 puskesmas	5 puskesmas	100	5 puskesmas	5 puskesmas	100
			1.02	‘02	202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah		100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘02**	**203**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**37 pkm**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**
			1.02	‘02	203.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	100	38 dokumen	38 dokumen	100
			1.02	‘02	203.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
			1.02	**‘02**	**204**	**"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas**	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**

						C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	**C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**							
			1.02	‘02	204 .03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	204 .04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	3	100	3	9	100
			1.02	**‘03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**70%**	**70%**	**70%**	**100**	**70%**	**210**	**70%**
			1.02	**‘03**	**201**	**Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota**	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘03	201 .01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Faskes tersebut	75%	75%	75%	100	75%		75%
			1.02	‘03	201 .02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘03**	**202**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan**	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**

						untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
			1.02	‘03	202.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘03	202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standart ketenagakerjaan minimal di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘03	202.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘03**	**203**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘03	203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	10	10	10	100	10	40	
			1.02	**‘04**		**"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"**	**PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**	**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**
			1.02	**‘04**	**201**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,**	**JUMLAH REKOMENDASI**	**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**

						Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN**							
			1.02	‘04	201.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	20	20	100	20	20	100
			1.02	**‘04**	**203**	**"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "**	**JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	**‘04**	**203.01**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	120	120	100	120	360	90

						Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
			1.02	**‘04**	**206**	**"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "**	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘04	206 .01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘05**		**"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘05**	**201**	**"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "**	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘05	201 .01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

						Pemberdayaan Masyarakat	bermitra dengan UKBM							
			1.02	**'05**	**202**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

No.	Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun				tahun		tahun		
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
1	Angka Kematian Ibu	-	56.58	60,63	60,63	56,58	56,58	57		61	61	
2	Angka Kematian Bayi	-	7.00	7,3	7,3	7	7	6.4		6	6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.75%	85	85	85	85	81.21		84.62	84.62	
4	Persentase Keluarga Sehat	-		100%	100%	100%	100%	100				
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		94	94	95	95	76,92		92.89	92.89	
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		96	96	97	97	78,70		94.38	94.38	
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		98	98	99	99	80,94		96.52	96.52	
8	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		84	84	86	86	78,98		84.90	84.90	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	83,29		95.82	95.82	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	42,41		28.33	28.33	
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		67%	67%	68%	68%	67,68		69.71	69.71	

12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	25.96	39,64	19.29	19.29	
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%		100%	100%	100%	100%	92.78	137,53	29.40	29.40	
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%		100%	100%	100%	100%	119.07	118,61	100	100	
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	100%		45%	50%	55%	60%	25.38	65,08	100	100	
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		60%	65%	70%	75%	68.82	89,36	87.76	87.76	

2.2.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu pada empat indikator pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas), Angka/Umur Harapan Hidup, Status Gizi Masyarakat.

A. Mortalitas (Angka Kematian)

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka Kematian yang terkait adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita serta Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan bencana alam.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

   Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Angka Kematian Ibu menurun dengan signifikan hal ini karena ditahun ini merupakan tahun ke 3 pandemi sudah siap menghadapinya, dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari mutu dan kualitasnya . AKI turun dari angka 29 menjadi angka 11 ditahun 2022 Penyebab kematian ibu masih berkutat pada Pre Eklamsia sebanyak 45 %, perdarahan 27% sisanya penyebab lain-lain sebanyak 27%. Usia kematian ibu terbanyak pada golongan usia produktif sebanyak 73 %.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Seiring dengan hal tersbut Angka Kematian bayi juga turun menjadi 122 bayi . dengan penyebab terbanyak kematian neonatal adalah Asfiksia 31,73%, BBLR 21,15 kelainan bawaan 25,96 dan sepsis 25, 96 %. Sedangkan untuk Post Natal Pneuomonia 72,22%, diare 5,56% dan Kelainan kongenental sebanyak 5,56%

B. Morbiditas (Angka Kesakitan)

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu morbiditas juga berperan dalan penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare

C. Angka/Umur Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan Angka/Umur Harapan Hidup merupakan salah satu faktor yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Angka/Umur Harapan Hidup untuk Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 adalah 72.61 , tahun 2021 meningkat menjadi 72.65 sedangkan Tahun 2022 adalah 72.97

D. Status Gizi Masyarakat

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mengetahui status gizi balita adalah dengan menggunakan metode antropometri. Dalam metode antropometri, indeks yang umum dipakai adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang kemudian dikategorikan dalam Berat Badan Lebih (Z score> +2 SD), Berat Badan Normal (Z score -2 SD sampai +2 SD), Berat Badan Kurang (Z score < -2 SD sampai -3 SD) dan Berat Badan Sangat Kurang (Z score < - 3 SD).

Berdasarkan data, jumlah balita yang ditimbang pada Tahun 2021 yaitu 88.95 balita. Sedangkan distribusi status gizi balita,sebanyak 95,0 % balita yang ditimbang mempunyai berat badan normal, 3,4 % balita mempunyai berat badan kurang, 0,6 % balita mempunyai berat badan sangat kurang dan 1,0 % balita mempunyai berat badan lebih.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
2) Pelayanan kesehatan balita sakit

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

Adapun untuk menggambarkan keberhasilan program penimbangan di Posyandu di wilayah Kabupaten Kediri, salah satu ukuran yang digunakan adalah dari kenaikan berat badan balita. Sehingga ibu balita berusaha untuk memberi asupan yang seimbang agar pada bulan penimbangan berikutnya berat badan balitanya meningkat secara signifikan.

Upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi :

1. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita, serta kepada ibu nifas.

   Strategi penanggulangan Kurang Vitamin A dilaksanakan melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu kapsul vitamin A biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Agustus, dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita (1-5 tahun) sebanyak dua kali setahun yaitu tiap bulan Februari dan Agustus.

   Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, cakupan pemberian kapsul vitamin A selama empat tahun terakhir sudah mengalami pencapaian sebanyak 90%.

   Hasil pencapaian tersebut dipengaruhi oleh jumlah sasaran berdasarkan perkiraan penduduk, keaktifan petugas mendistribusikan kapsul vitamin A dan ibu balita yang menyadari akan pentingnya kapsul vitamin A bagi balitanya.

2. ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan tanpa diberi makanan lain selain ASI. ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan bayi guna pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pencapaian pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah, hanya berkisar antara 70-75%, sedangkan sampai akhir tahun 2021 masih tercatat 62.6% dari total bayi yang ada di Kabupaten Kediri.

Untuk menghitung cakupan ASI eksklusif dilakukan dengan cara menjumlah semua bayi mulai umur 0 – 6 bulan yang diberi ASI eksklusif dan dibandingkan dengan jumlah bayi yang diperiksa. Sosialisasi pemberian ASI eksklusif melalui lintas sektor dan program, posyandu, LSM, PKK, serta tokoh masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Adanya penurunan capaian ASI eksklusif dalam satu tahun terakhir dikarenakan masih belum tertibnya pencatatan dan pelaporan dari desa.

3. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi yang dimaksud adalah status/keadaan gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U < -3 SD). Kasus gizi buruk dapat terjadi karena keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi (karbohidrat, protein dan lemak) dalam makanan sehari-hari dan atau disertai penyakit infeksi, sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan sering disertai dengan kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

Sampai dengan akhir Tahun 2021 balita gizi buruk yang ditemukan adalah sejumlah 83 orang, semuanya mendapatkan intervensi dari Dinas Kesehatan maupun sumber lain berupa Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berupa susu balita.

Pada tahun 2021 Kabupaten Kediri menjadi daerah lokus stunting, dimana penanganan gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tetapi merupakan tugas dari semua elemen masyarakat dan semua sektor terkait dengan penanganan stunting.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2023 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Kesehatan dan juga tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan. Review terhadap RKPD meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri berupa RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

TABEL 2.3

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kediri

	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "**	Dinkes	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**160.883.379.069**	**"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "**	Dinkes	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	12 Bulan	**90.004.380.225,00**	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	201.703.025,00	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	195.007.500,00	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95.250.027.614,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	86.780.194.733,00	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	909.965.180,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat	100%	1.262.739.900,00	

								Daerah			
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	973.865.730,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.135.989.000,00	
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	868.381.453,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	630.449.092,00	
	7 Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	59.310.771.457,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	59.310.771.457,00	
	"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"	**Dinkes**	Persentase Kecamatan STBM Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Indeks Keluarga Sehat Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	**100%**	**92.192.747.079,00**	**"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"**	**Dinkes**	Persentase Kecamatan STBM Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Indeks Keluarga Sehat Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	**100%**	**83.781.008.719,00**	

								terakreditasi			
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin					Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
			AKI					AKI			
			AKB					AKB			
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	46.121.892.500,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	32.149.948.000,00	
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	100.161.418.353,67	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	49.899.973.043,00	
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	150.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	498.847.676,00	
		"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	1.540.345.448,00	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	1.232.240.000,00	

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Dinkes**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100%**	**900.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Dinkes**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100%**	**2.977.790.151,00**	
	1 Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%		Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	24.779.500,00	
	2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah	100%	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah	100%	141.118.800,00	
	3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	2.811.891.851,00	
	"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"	**Dinkes**	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot**	100%	**618.914.692,00**	**"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"**	**Dinkes**	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot**	100%	**1.219.613.600,00**	
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%	278.693.000,00	
2	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang	100%		"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt	100%	383.423.000,00	

	dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "		diterbitkan			Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "		yang diterbitkan			
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM)	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%						103.586.800,00	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%						60.387.800,00	
3	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%		"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%	393.523.000,00	
	"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	**Dinkes**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren,**	**65,03%**	**3.383.720.527**	**"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang**	**Dinkes**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita,**	**65,03 %**	**2.482.516.706,00**	

			poskesdes, SBH, desa siaga)			**Kesehatan"**		**poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**			
1	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "	Dinkes	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	626.451.475,00	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "	Dinkes	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	135.061.000,00	
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	1.966.233.752,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	926.622.200,00	
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	791.035.300,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	1.420.833.506,00	
	TOTAL				***259.693.029.952,00***					***180.465.309.401,00***	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kediri demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, maupun dari SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD baik dari segi penjelasan kesehatan maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 Kabupaten Kediri tersaji dalam table berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

TIDAK ADA USULAN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.Dalam menyusun Program dan Kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kesehatan yaitu terhadap Pembentukan Lingkungan Sehat dan Pembentukan Perilaku Hidup Sehat. Untuk terselenggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesehatan masyarakat
b. Meningkatnya pengendalian penyakit
c. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
d. Meningkatnya jumlah, jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
e. Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
f. Meningkatnya sinergitas antar kementrian / lembaga pusat dan daerah
g. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
h. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimtek dan monev
i. Meningkatnya efetifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
j. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
k. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kemetrian kesehatan
l. Meiningkatnya system informasi kesehatan terintegrasi

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2021-2026 yang terjuang dalam renstra kementerian kesehatan tahun 2021-2026, adalah “meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan dasar *(primary health care)* dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi”

Adapun strategi RPJMN 2021-2026 bidang kesehatan :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat
5. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk menyamakan persepsi seluruh aparat perencana yang ada di Dinas Kesehatan, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam meyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan kabupaten Kediri salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah ” Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat”. Dengan Indikator tujuan adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator sasaran**	**Target tahunan**					
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Presentase masyarakat yeng memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	59 % (21 Puskesmas paripurna 3 utama 18) RS paripurna 1; RS Utama 1	62 % (22 Puskesmas paripurna 3 utama 19) RS paripurna 1; RS Utama 1	63 % (23 Puskesmas paripurna 3 utama 20) RS paripurna 2;	72 % (26 Puskesmas paripurna 4 utama 22) RS paripurna 2;	80 % (29 Puskesmas paripurna 5 utama 24) RS paripurna 2;	87 % (39 Puskesmas paripurna 6 utama 26) RS paripurna 2;

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian SDGs. Adapun program dan kegiatan

yang dirancang Dinas Kesehatan pada tahun 2025 sebanyak 5 program dan 17 kegiatan, untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Program Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,

		Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan puskesmas
		Pengembangan Puskesmas
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan

		Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

	dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"
"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat "
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Daya

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan. Adapun rencana kerja tahun 2025 dan kebutuhan anggaran tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kediri

Kode	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu definitive tahun 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	**Urusan : Layanan Dasar**								
	2. Persentase Keluarga Sehat	**Bidang : Kesehatan**								
1.02.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**			100%	**169.680.687.270,00**	**DAU**		100%	**161.522.046.000,00**
1.02.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun**	**Dinkes**	**4 Dokumen**	**227.773.200,00**				**235.000.000,00**
1.02.01.2.01.01		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang disusun	Dinkes	4 Dokumen	102.950.000,00	APBD	Baru	6 Dokumen	110.000.000,00
1.02.01.2.01.06		2. Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Dokumen laporan pencapaian kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD yang	Dinkes	12 Bulan	124.823.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	125.000.000,00

				disusun							
1.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**165.487.112.470,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**2.375.000.000,00**
1.02.01.2.02.01		1.	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	163.104.382.624,00	APBD	Baru	12 Bulan	83.512.042.883,00
1.02.01.2.02.02		2.	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1.127.749.846,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.025.000.000,00
1.02.01.2.02.03		3.	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Tersedianya anggaran untuk verifikasi keuangan SKPD selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1.144.980.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.240.000.000,00
1.02.01.2.02.05		4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersdianya anggaran untuk penyusunalan laporan keuangan akhir tahun	Dinkes	12 bulan	65.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	65.000.000,00
1.02.01.2.02.07		5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersdianya anggaran untuk penyusunalan laporan keuangan bulanan	Dinkes	12 bulan	45.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	45.000.000,00
1.02.01.2.05		**Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah**				**12 Bulan**	**60.900.000,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**100.000.000,00**
1.02.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya (batik 40 jt)	Tersedianya anggaran untuk seragam Dinkes	Dinkes	12 Bulan	60.900.000,00				100.000.000,00
1.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Selama 1 tahun**	**Dinkes**	**12 bulan**	**450.789.400,00**	**APBD**	**Baru**	**12 bulan**	**676.000.000,00**
1.02.01.2.06.01		1.	Penyediaan KomponenInstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	44.498.800,00	APBD	Baru	12 bulan	45.000.000,00

1.02.01.2.06.02		2.	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Teresdianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	69.970.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	120.000.000,00
1.02.01.2.06.03		3.	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Teresedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	39.505.400,00	APBD	Baru	12 Bulan	34.000.000,00
1.02.01.2.06.04		4.	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Teresedianya Bahan Logistik Kantor	Dinkes	12 bulan	162.827.400,00	APBD	Baru	12 Bulan	162.000.000,00
1.02.01.2.06.05		5.	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinkes	12 bulan	59.990.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	60.000.000,00
1.02.01.2.06.06		6.	Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Teresedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang – undangan	Dinkes	12 bulan	6.582.600,00	APBD	Baru	12 Bulan	15.000.000,00
1.02.01.2.06.08		7.	Fasilitasi KunjunganTamu	Tersedianya Persediaan kunjungan tamu	Dinkes	12 bulan	67.415.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	240.000.000,00
1.02.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Teresedianya Jasa penunjang ursan pemerintah daerah**	**Dinkes**	**12 bulan**	**1.435.878.300,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**1.607.346.000,00**
1 02 01 2.08 01		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedaiaan jasa surat menyurat	Dinkes	12 Bulan	2.500.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	2.500.000,00
1.02.01.01.2.08.02		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinkes	12 bulan	578.745.300,00	APBD	Baru	12 Bulan	675.000.000,00
1.02.01.01.2.08.03		3.	Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatam dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	120.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	120.000.000,00
1.02.01.01.2.08.04		4.	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum dan kantor	Dinkes	12 bulan	734.633.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	809.846.000,00
1.02.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**Tersedianya biaya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**2.018.233.900,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**1.194.500.000,00**
1.02.01.2.09.01		1.	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan	Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan	Dinkes	12 Bulan	24.800.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	55.000.000,00

			PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan							
1.02.01.2.09.02		2.	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Dinkes	12 Bulan	628.723.700,00	APBD	Baru	12 Bulan	679.500.000,00
1.02.01.2.09.05		3.	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya pemeliharaan mebel dalam satu tahun	Dinkes	12 Bulan	10.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	10.000.000,00
1.02.01.2.09.06		4.	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Dalam atu tahun	Dinkes	12 Bulan	154.710.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	250.000.000,00
1.02.01.2.09.06		5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainya	Dinkes	12 Bulan	1.200.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	200.000.000,00
1.02.01.2.09.10		6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Dinkes	12 Bulan	0	APBD	Baru	12 Bulan	0
1.02.02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**			**170.620.190.212,00**				**151.677.200.000,00**
1.02.02.2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot**		**Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**22.698.667.292,00**		**Baru**	**12 Bulan**	**16.200.000.000,00**

1 02 02 2.01 02			Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	15.084.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	3.000.000.000,00
1 02 02 2.01 06			Pengembangan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	2.200.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	350.000.000,00
1 02 02 2.01 09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	450.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.700.000.000,00
1.02.02.2.14		3.	Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Tersedianya Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Dinkes	12 Bulan	473.155.764,00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum DBH CHT	Baru	12 Bulan	1.500.000.000,00
1.02.02.2.16		4.	Pengadaan obat, vaksin dan BMHP	Tersedianya pengadaan obat, vaksin	Dinkes	12 Bulan	3.795.834.428,00	APBD	Baru	12 Bulan	8.500.000.000,00
1.02.02.2.20		6.	Pemeliharaan Rutin danBerkala AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Pemeliharaan Rutin danBerkala AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Dinkes	12 Bulan	325.677.400,00	APBD	Baru	12 Bulan	500.000.000,00
1.02.02.2.24		24	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		Dinkes	12 Bulan	119.999.700,00	APBD	Baru	12 Bulan	200.000.000,00
1 02 02 2.01 21			Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP,	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu	Dinkes	12 Bulan	250.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	450.000.000,00

			makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	tahun							
1.02.02.2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**147.368.053.920,00**				**135.222.200.000,00**
1.02.02.2.02.01		1.	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Dinkes	100%	165.620.000,00	APBD	Baru	100%	170.000.000,00
1.02.02.2.02.02		2.	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Cakupan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Dinkes	100%	126.740.000,00	APBD	Baru	100%	126.700.000,00
1.02.02.2.02.03		3.	Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	100%	469.983.740,00	APBD	Baru	100%	470.000.000,00
1.02.02.2.02.04		4.	Pengelolaan PelayananKesehatan Balita	Cakupan PelayananKesehatan Balita	Dinkes	100%	149.961.000,00	APBD	Baru	100%	150.000.000,00
1.02.02.2.02.05		5.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	Dinkes	100%	162.189.000,00	APBD	Baru	100%	165.000.000,00
1.02.02.2.02.06		6.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif	Dinkes	100%	162.873.400,00	APBD	Baru	100%	175.000.000,00
1.02.02.2.02.07		7.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaLanjut	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaLanjut	Dinkes	100%	92.273.800,00	APBD	Baru	100%	100.000.000,00
1.02.02.2.02.08		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Dinkes	100%	138.795.000,00	APBD	Baru	100%	145.000.000,00
1.02.02.2.02.09		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	Dinkes	100%	2.103.141.600,00	APBD	Baru	100%	2.105.000.000,00
1.02.02.2.02.10		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinkes	100%	291.289.700,00	APBD	Baru	100%	300.000.000,00

1.02.02.2.02.11		11	Pengelolaan PelayananKesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	Cakupan PelayananKesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	Dinkes	100%	1.430.017.400,00	APBD	Baru	100%	1.450.000.000,00
1.02.02.2.02.12		12	Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Cakupan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Dinkes	100%	544.652.500,00	APBD	Baru	100%	550.000.000,00
1.02.02.2.02.13		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Dinkes	100%	75.000.000,00	APBD	Baru	100%	75.000.000,00
1 02 02 2.02 14		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Dinkes	100%	13.044.000,00	APBD	Baru	100%	15.000.000,00
1.02.02.2.02.15		15	Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat	Cakupan PelayananKesehatan GiziMasyarakat	Dinkes	100%	476.193.000,00	APBD	Baru	100%	476.000.000,00
1.02.02.2.02.16		16	Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga	Cakupan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga	Dinkes	100%	138.330.000,00	APBD	Baru	100%	65.000.000,00
1.02.02.2.02.17		17.	Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan	Cakupan PelayananKesehatan Lingkungan	Dinkes	100%	1.373.305.000,00	APBD	Baru	100%	1.350.000.000,00
		18.	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Cakupan Pelayanan promosi Kesehatan	Dinkes	100%	202.158.860,00	APBD	Baru	100%	310.000.000,00
1.02.02.2.02.19		19.	Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya	Cakupan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya	Dinkes	100%	103.282.700,00	APBD	Baru	100%	104.000.000,00
1.02.02.2.02.20		20.	Pengelolaan SurveilansKesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	Dinkes	100%	134.319.700,00	APBD	Baru	100%	135.000.000,00

1.02.02.2.02.22		22.	Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa danNAPZA	Cakupan PelayananKesehatan Jiwa danNAPZA	Dinkes	100%	42.423.000,00	APBD	Baru	100%	43.000.000,00
1.02.02.2.02.25		25.	Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular	Cakupan Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular	Dinkes	100%	3.328.733.500,00	APBD	Baru	100%	3.400.000.000,00
1.02.02.2.02.26		26.	Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Dinkes	100%	134.327.391.800,00	APBD	Baru	100%	122.000.000.000,00
1.02.02.2.02.28		28.	Pengambilan danPengiriman SpesimenPenyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional	Presentase Pengambilan danPengiriman SpesimenPenyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional	Dinkes	100%	425.069.500,00	APBD	Baru	100%	450.000.000,00
1.02.02.2.02.29		29.	PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat	Presentase kabupaten sehat	Dinkes	100%	50.000.000,00	APBD	Baru	100%	50.000.000,00
1.02.02.2.02.34		34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Kesehatan lainya	Dinkes	100%	16.524.000,00	APBD	Baru	100%	18.000.000,00
1.02.02.2.02.36		36	Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal)	Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal)	Dinkes	100%	106.180.100,00	APBD	Baru	100%	106.000.000,00
1 02 02 2.02 37			Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah	Dinkes	100%	75.000.000,00	APBD	Baru	100%	75.000.000,00
1 02 02 2.02 38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	100%	381.260.000,00	APBD	Baru	100%	381.000.000,00
1 02 02 2.02 42			Pelayanan kesehatan Malaria	Pelayanan kesehatan Malaria	Dinkes	100%	2.392.000,00	APBD	Baru	100%	2.500.000,0

1 02 02 2.02 46			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes	100%	259.909.620,00	APBD	Baru	100%	260.000.000,00
1.02.02.2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi**					**136.200.000,00**				**135.000.000,00**
1.02.02.2.03.01		1.	Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan	Jumlah pengelola data dan informasi kesehatan	Dinkes	100%	136.200.000,00	APBD	Baru	100%	135.000.000,00
1.02.02.2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**417.269.000,00**				**120.000.000,00**
1.02.02.2.04.03		1.	Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan	Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan	Dinkes	100%	357.400.000,00	APBD	Baru	100%	60.000.000,00
1.02.02.2.04.04		2.	Penyiapan Perumusandan PelaksanaanPelayanan KesehatanRujukan	Penyiapan Perumusandan PelaksanaanPelayanan KesehatanRujukan	Dinkes	100%	59.869.000,00	APBD	Baru	100%	60.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	Dinkes	70%	**1.903.733.700,00**	APBD	Baru	100%	**2.011.000.000,00**
		Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota		Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	Dinkes	100%	**159.274.800,00**	APBD	Baru	100%	**185.000.000,00**
		2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Dinkes	100%	159.274.800,00	APBD	Baru	100%	185.000.000,00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**Dinkes**	**100%**	**26.758.400,00**	APBD	Baru	100%	**26.000.000,00**

		1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	9.799.600,00	APBD	Baru	100%	10.000.000,00
		3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	16.958.800,00	APBD	Baru	100%	16.000.000,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya**	**Dinkes**	**100%**	**1.717.700.500,00**	APBD	Baru	100%	**1.800.000.000,00**
		1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	**Dinkes**	**100%**	1.717.700.500,00	APBD	Baru	100%	1.800.000.000,00
1.02.04		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN**					**656.118.870,00**				**663.000.000,00**
1.02.04.2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					**67.200.000,00**				**68.000.000,00**
1.02.04.2.03.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat ProduksiPangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRTsebagai Izin	Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat ProduksiPangan Industri RumahTangga dan	Dinkes	100%	67.200.000,00	APBD	Baru	100%	68.000.000,00

			Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangdapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga	Nomor P-IRTsebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangdapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga							
1 02 04 2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			Dinkes	100%	**85.000.000,00**				**85.000.000,00**
1 02 04 2.04 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Dinkes	100%	85.000.000,00	APBD	Baru	100%	85.000.000,00
1 02 04 2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**					**55.000.000,00**				**60.000.000,00**
1 02 04 2.05 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Dinkes	100%	55.000.000,00	APBD	Baru	100%	60.000.000,00
1.02.04.2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan MinumanIndustri Rumah**	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN**		Dinkes	100%	**448.918.870,00**	APBD	Baru	100%	**450.000.000,00**

		Tangga	**INDUSTRI RUMAH TANGGA**							
1.02.04.2.06.01		1. Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Dinkes	100%	448.918.870,00	APBD	Baru	100%	450.000.000,00
1.02.05		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	Dinkes	100%	**974.921.500,00**	APBD	Baru	100%	**983.000.000,00**
1.02.05.2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	Dinkes	100%	**831.915.200,00**	APBD	Baru	100%	**840.000.000,00**
1.02.05.02.01.01		1. Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat	Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat	Dinkes	100%	831.915.200,00	APBD	Baru	100%	840.000.000,00
1.02.05.2.02.05		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	Dinkes	100%	**65.000.000,00**	APBD	Baru	100%	**65.000.000,00**
1.02.05.2.02.01		1. PenyelenggaraanPromosi Kesehatan danGerakan Hidup Bersihdan Sehat	PenyelenggaraanPromosi Kesehatan danGerakan Hidup Bersihdan Sehat	Dinkes	100%	65.000.000,00	APBD	Baru	100%	65.000.000,00
1.02.05.2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya KesehatanBersumber Daya**				**78.006.300,00**				**78.000.000,00**

		Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota									
1.02.05.2.03.01		1.	Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM	Dinkes	100%	78.006.300,00	APBD	Baru	100%	78.000.000,00
TOTAL							***343.835.651.552,00***				***161.522.046.000,00***

BAB V
PENUTUP

Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025. Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja merupakan hal yang penting dan sangat perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Keberhasilan dalam pelaksanaan program-program tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung juga dengan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat, supaya suatu rencana dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, keseluruhan program ini diharapkan dapat diaktualisasi sesuai visi, misi Kabupaten Kediri dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam hubungan yang dinamis dan sinergi.

Kediri, - 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

Ahmad Khotib
NIP. 197003242002121003

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA